RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

AKD: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Bulan: April 2022

Oleh: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

GAMBAR


# PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September 2019.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dapat disetujui menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pimpinan rapat.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan mengenai RUU PSDN selama dibahas di Komisi I bersama Kementerian Pertahanan.

Abdul mengatakan, keberadaan RUU PSDN sebagai upaya strategis negara dalam menata keteraturan sistem pertahanan negara. "Pelibatan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar komponen utama," kata Abdul.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, selaku perwakilan presiden, pihaknya setuju untuk RUU PSDN disahkan menjadi UU. "Menyatakan setuju terhadap RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk disahkan menjadi UU," kata Ryamizard.

Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Nasional untuk Pertahanan.

Dasar hukum Undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam undang-undang ini diatur tentang: Asas, Tujuan, dan Ruang lingkup, Bela Negara, Komponen Pendukung, Komponen Cadangan, Pendanaan, Pengawasan dan Ketentuan Pidana.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/14014161/dpr-sahkan-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional

| JENIS | KETERANGAN | URL |
|---|---|---|
| Berita | Aparatur Sipil Negara disiapkan untuk Menjadi Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara | https://jdih.maritim.go.id/id/\naparatur-sipil-negara-disiapka\nn-untuk-menjadi-komponen-cadan\ngan-dalam-mendukung-upaya-pert\nahanan-negara |
| Berita | DPR Sahkan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional | https://nasional.kompas.com/re\nad/2019/09/26/14014161/dpr-sah\nkan-ruu-pengelolaan-sumber-day\na-nasional |
| Berita | Imparsial Kritik RUU Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara | https://nasional.tempo.co/read\n/1251508/imparsial-kritik-ruu-\npengelolaan-sumber-daya-pertah\nanan-negara |
| Berita | Keberadaan Sumber Daya Nasional Sangat Penting Untuk Pertahanan Negara | https://tni-au.mil.id/keberada\nan-sumber-daya-nasional-sangat\n-penting-untuk-pertahanan-nega\nra/ |
| Berita | Mengintip Isi Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara | https://www.hukumonline.com/be\nrita/a/mengintip-isi-perpres-k\nebijakan-umum-pertahanan-negar\na-lt600dae2d85692/ |
| Berita | Menyoal Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) | https://www.komnasham.go.id/in\ndex.php/news/2020/3/23/1338/me\nnnyoal-undang-undang-pengelolaa\nnn-sumber-daya-nasional-untuk-p\nertahanan-negara-psdn.html |
| Berita | Menyoal Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) | https://www.komnasham.go.id/in\ndex.php/news/2020/3/23/1338/me\nnnyoal-undang-undang-pengelolaa\nnn-sumber-daya-nasional-untuk-p\nertahanan-negara-psdn.html |
| Berita | Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019) | https://yuridis.id/pengelolaan\n-sumber-daya-nasional-untuk-pe\nrtahanan-negara-undang-undang-\nrepublik-indonesia-nomor-23-ta\nhun-2019/ |
| Berita | Perkuat Bela Negara, ASN Masuk Komponen Cadangan | https://kominfo.go.id/content/\ndetail/39069/perkuat-bela-nega\nra-asn-masuk-komponen-cadangan\n/0/berita |
| Berita | UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | https://www.jogloabang.com/pus\ntaka/uu-23-2019-pengelolaan-su\nmber-daya-nasional-pertahanan-\nnegara |
| Berita | UU pengelolaan sumber daya nasional disahkan, negara bisa tunjuk cadangan SDA | https://nasional.kontan.co.id/\nnews/uu-pengelolaan-sumber-day\na-nasional-disahkan-negara-bis\na-tunjuk-cadangan-sda |
| Berita | Wamenhan Sebut Pentingnya Kolaborasi Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara | https://www.republika.co.id/be\nrita/r5zm7q423/wamenhan-sebut-\npentingnya-kolaborasi-perbarui\n-kebijakan-pertahanan-negara |
| Jurnal | Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | https://journal.uii.ac.id/Lex-\nRenaissance/article/download/1\n8805/pdf |
| Jurnal | Hubungan Tingkat Pemahaman Konsep Pertahanan dan Keamanan Bangsa Indonesia Dengan Sikap Patriotisme | http://jurnal.fkip.unila.ac.id\n/index.php/JKD/article/view/76\n54 |
| Jurnal | Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Konflik di Laut China Selatan | https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/a\nrticle/view/6776/5314 |
| Jurnal | Pembangunan Industri Pertahanan Nasional Pada Era Revolusi Industri 4.0 | https://journal.ipts.ac.id/ind\nex.php/ED/article/view/3295/21\n58 |
| Jurnal | Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penagakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara | https://ejournal.balitbangham.\ngo.id/index.php/dejure/article\n/view/56/8 |

| | | |
|---|---|---|
| Jurnal | Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dengan Konsep Keamanan Nasional terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa di Papua | https://www.google.com/url?sa= \nt&source=web&rct=j&url=http:// \njournal.uta45jakarta.ac.id/ind \nex.php/polhi/article/download/ \n10/7&ved=2ahUKEwjL44-Y9Zf2AhUu \nUGwGHaBTB8I4RhAWegQIHBAB&usg=A \nOvVaw1k3fXyrV3r8GCyYXHIUBTX |
| Jurnal | Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara | https://ejournal.fisip.unjani. \nac.id/index.php/jurnal-academi \na-praja/article/view/629/267 |
| Jurnal | Studi Pertahanan di Indonesia | https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/a \nrticle/view/22976/15232 |
| Buku | Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal | http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=221 \n24&keywords=pertahanan+negara |
| Undang-undang & Peraturan | Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | https://www.dpr.go.id/jdih/ind \nex/id/1758 |
| Undang-undang & Peraturan | Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010 | https://jdihn.go.id/files/225/ \n20170826000753.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/123685/uu-no-23-tah \nun-2019 |
| Undang-undang & Peraturan | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Penjelasan) | https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/123685/uu-no-23-tah \nun-2019 |
| Undang-undang & Peraturan | Undang Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih | https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/45405/uu-no-56-tahu \nn-1999 |
| Undang-undang & Peraturan | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi | https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/46042/uu-no-27-tahu \nn-1997 |